

Kemenpar dan Pemprov Bali Perkuat Kolaborasi Kembangkan Wisata Berkualitas

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dalam upaya pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi tantangan dan isu-isu terkini di salah satu provinsi unggulan pariwisata Indonesia tersebut.

Menteri Pariwisata (Menteri) Widiyanti Putri Wardhana dalam lewat keterangan yang diterima dan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan Bali merupakan destinasi yang sangat strategis dan memiliki posisi krusial dalam peta pariwisata Indonesia, yang ditandai dengan jumlah kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Jadi, izinkan kami menaruh perhatian khusus pada Bali," ujar Menpar.

Widiyanti menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera mendapat tindak lanjut melalui sinergi yang

kuat. Pertama terkait akomodasi, khususnya vila yang tidak memiliki izin operasi resmi. Selain itu, juga tantangan pembangunan dan tata ruang pariwisata di Bali yang perlu lebih merata dan tanpa menggeser fungsi lahan produktif.

Pihaknya pun memberikan atensi khusus dan siap untuk terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan pembahasan strategis. Hal itu termasuk terkait permasalahan kemacetan, pengelolaan sampah, serta pengembangan pariwisata di Bali Utara dan Bali Barat.

"Kami juga memahami bahwa saat ini terdapat tantangan di Bali terkait perilaku sebagian wisatawan. Kami akan terus men-



Pemprov Bali dan Menteri Pariwisata saat pertemuan bahas arah kebijakan pariwisata Bali ke depan, Denpasar, Sabtu 19/7/2025. (ANTARA/ho-pemprov Bali)

dorong edukasi wisatawan melalui kolaborasi dengan KBRI dan kanal-kanal lainnya khususnya dalam menyosialisasikan apa yang boleh dilakukan dan dilarang yang sesuai dengan nilai dan ketentuan lokal," ujarnya pula.

Selain itu yang tidak kalah penting adalah upaya memperkuat promosi Bali secara kon-

sisten. Meski Bali sudah menjadi top of mind, namun tetap perlu upaya-upaya untuk terus menjaga dan memperkuat promosi Bali.

Untuk itu, sinergi dalam penguatan program harus menjadi perhatian bersama. Kementerian Pariwisata selalu terbuka untuk menyerap aspirasi lebih lanjut. (ant)

Wagub Bali Rancang Program Bedah Rumah Solusi Berantas Kemiskinan



Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bahas program bedah rumah untuk pengentasan kemiskinan di Denpasar, Rabu 16/7/2025. ANTARA/HO-Pemprov Bali

WAKIL Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta merancang program bedah rumah sebagai salah satu solusi pengentasan kemiskinan di daerah itu.

"Bantuan bedah rumah yang akan dirancang ke depan ini minimal satu orang kepala keluarga (KK) ini mendapat Rp100 juta, artinya betul-betul tuntas

pembangunan itu, sehingga tidak susah untuk meminjam uang lagi ke mana-mana," kata dia dalam keterangan di Denpasar, Rabu.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 itu Giri mengatakan kebijakan ini ada kajiannya, dan akan dimulai tahun

2026 dengan target 1.000 unit rumah setahun.

Ia menjelaskan Pemprov Bali tidak hanya sekadar melakukan bedah rumah namun di dalamnya mencakup aspek pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan, sandang, dan papan.

"Wajib yang dimaksud dengan pangan, sandang dan papan, pangan itu paling tidak makanan, sandang itu tempat tinggal, listrik, air minum, pakaiannya, dan papan ini rumah, itu yang saya sebut program bedah rumah," ujar Giri Prasta.

Sebagai informasi, tingkat kemiskinan di Bali per September 2024 tercatat sebesar 3,8 persen, meski terendah secara nasional, rapat koordinasi TKPK tetap dilakukan Pemprov Bali untuk mengevaluasi kinerja dan terus menekan angka kemiskinan.

Wagub Giri Prasta menyadari target pengentasan kemiskinan

hingga 0 persen merupakan hal yang sulit tercapai, bahkan di negara maju sekalipun.

Namun upaya menurunkannya secara signifikan tetap ingin dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dari penghitungannya, Giri menyebut untuk Pemprov Bali sendiri, apabila target 1.000 rumah per tahun direalisasikan, maka akan dibutuhkan alokasi anggaran senilai Rp100 miliar per tahun, belum termasuk kontribusi dari kabupaten/kota maupun sektor swasta.

"Misalkan kalau Provinsi Bali ada 1.000 rumah itu dananya sudah Rp100 miliar, belum lagi kabupaten/kota, sehingga 5 tahun ini saya kira untuk mengurangi kemiskinan di Bali akan bisa sekali," ucapnya.

Yang terpenting menurutnya adalah data akurat, sehingga pengentasan kemiskinan dapat tepat sasaran. (ant)

Pemkot Denpasar Adakan Perizinan Keliling Guna Bantu Masyarakat

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar, Bali memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan mengencarkan pelayanan perizinan keliling.

Pelaksanaan kegiatan guna memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus perizinan ini kembali digelar dengan menyoar masyarakat di kawasan Pasar Badung, Kota Denpasar, Kamis.

Kepala DPMPTSP Kota Denpasar IB Benny Pidada Rurus mengatakan optimalisasi pelayanan perizinan keliling ini guna memberikan kemudahan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Ia menjelaskan masyarakat tidak harus datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Sewakadarma untuk mengurus suatu perizinan.

"Tujuan kami untuk optimalisasi pelayanan serta mem-



berikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan berbasis OSS," katanya.

Dalam pelayanan keliling yang berlangsung selama dua hari, pada 16 dan 17 Juli 2025, beragam proses perizinan dilayani, seperti perizinan berusaha, pembuatan nomor induk berusaha (NIB), layanan perizinan IUMK melalui OSS dan layanan lainnya.

"Jadi masyarakat tinggal melengkapi persyaratannya, jika sudah sesuai, maka dapat datang langsung ke layanan perizinan keliling sesuai dengan jadwal," ujar dia.

Perbekel Dauh Puri Kangin



Masyarakat antusias menikmati pelayanan perizinan keliling di Kawasan Pasar Badung, Kota Denpasar, Kamis (17/7). ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

Ni Ketut Angreni Wati mengatakan setidaknya sekitar 40 warga mendaftar untuk mendapatkan pelayanan ini.

"Kami mengapresiasi kegiatan ini, karena dapat memudahkan warga kami dalam hal

pengurusan perizinan dengan metode jemput bola. Animo warga kami tinggi terhadap kegiatan ini, terbukti dengan banyaknya warga kami yang mendatangi lokasi sejak pagi," ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar Berikan Subsidi Bagi Siswa Tak Lolos Daftar SMP negeri

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali memberikan subsidi uang sekolah bagi siswa yang tidak lulus dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) SMP negeri periode tahun 2025/2026 di daerah itu.

Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara di Denpasar, Jumat, menekankan salah satu misi pembangunan Kota Denpasar ke depan adalah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) handal yang berdaya saing. Salah satu upaya yang digencarkan adalah memastikan proses pendidikan berjalan baik dan optimal.

"Tentunya kami di Kota Denpasar sangat berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan sektor pendidikan yang merata, berkelanjutan dan pro rakyat, salah satunya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak diterima di SMP negeri," ujarnya.

Secara teknis, Kadisdikpora Kota Denpasar AA Gede Wiratama saat dikonfirmasi terpisah menjelaskan bantuan subsidi dana pendidikan tersebut diberikan guna mendukung optimalisasi pelaksanaan pendidikan di Kota Denpasar.



Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar

Hal ini mengingat daya tampung SMP negeri di Kota Denpasar sangat terbatas dan belum mampu menampung lulusan SD secara menyeluruh.

Dia menjelaskan Pemkot Denpasar melalui Disdikpora akan memberikan subsidi sebesar Rp1,5 juta bagi murid yang bersekolah di SMP swasta tahun 2025 ini. Namun dengan persyaratan, murid tersebut harus mendaftar SPMB SMP negeri dengan status berkas terverifikasi, namun tidak lolos dalam perangkaian.

Selain itu, murid tersebut juga wajib memiliki kartu keluarga (KK) Denpasar.

"Tahun ini masih (dapat subsidi), bagi murid yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri dan lanjut sekolah di SMP swasta akan diberi bantuan subsidi sebesar Rp1,5 juta dan wajib memiliki KK Kota Denpasar," paparnya.

Namun terkait jumlah murid, pihaknya masih belum bisa memastikan. Usai SPMB ini, baru akan mengetahui jumlah murid yang berhak menerima subsidi tersebut. (ant)

Bupati Gianyar Lantik 3.941 PPPK

BUPATI Gianyar, I Made Mahayastra melantik 3.941 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Alun-alun Kota Gianyar, Kamis.

“Saya mengucapkan selamat pada 3.941 orang yang terdiri dari 395 orang tenaga kesehatan, 2.939 orang tenaga teknis, 607 orang tenaga guru yang telah diambil sumpah janji dan dilantik pada hari ini,” ujar Bupati, di Gianyar.

Sebelum dilantik dan mengucap sumpah janji, PPPK berjalan dari Stadion Kapten I Wayan Dipta sampai Alun-alun Kota Gianyar yang dipimpin langsung Bupati Gianyar.

Berjalan kaki dari Stadion Dipta menuju tempat pengambilan sumpah menciptakan momentum tersendiri dan histori, bahwa setiap langkah kaki merupakan perjuangan dari penantian yang panjang bahkan ada yang sangat panjang untuk menjadi PPPK.

Lebih lanjut Bupati Mahaya-

stra mengungkapkan, proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, formasi tahun 2024 tahap 1, telah melalui proses yang cukup panjang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji yang dilaksanakan menandakan adanya amanah baru yang diemban. Sebagai bagian dari ASN, dituntut untuk mampu melaksanakan amanah, baik sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah dan sebagai abdi masyarakat.

“Saya berharap PPPK yang dilantik hari ini harus menjaga integritas, loyalitas, kejujuran, kreativitas, inovatif dan disiplin serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi masing-masing,” katanya.

Bupati Gianyar minta agar seluruh PPPK terus memacu diri untuk tetap berdedikasi dan berprestasi dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di Kabupaten Gianyar.”



Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyerahkan surat keputusan pengangkatan pegawai. ANTARA/HO-Humas Gianyar

Sekretaris Daerah Dewa Gede Alit Mudiarta selaku Ketua panitia pengadaan pegawai aparatur sipil negara, menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pertama, pada hari Rabu (9/7) dilaksanakan mejaya – jaya serta sembahyang bersama di

Padmasana Kantor Bupati Gianyar, serta pada Kamis, (10/7) dilaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji sekaligus penyerahan Surat Keputusan Bupati Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 tahap 1. (ant)

Bupati Tabanan Tegaskan Jaga Jatiluwih Berbasis Alam dan Budaya



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya membuka Festival Jatiluwih VI/2025 di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Sabtu (19/7/2025). ANTARA/Pande Yudha

BUPATI Tabanan I Komang Gede Sanjaya menegaskan pentingnya menjaga eksistensi Jatiluwih sebagai destinasi wisata unggulan berbasis alam dan budaya.

“Jatiluwih telah dikenal luas di dunia sebagai destinasi dengan pemandangan alam

pegunungan yang asri, keunikan sawah berundak, serta sistem irigasi tradisional Subak yang luar biasa,” kata dia saat membuka Festival Jatiluwih VI/2025 di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Sabtu.

Dia menjelaskan Festival Ja-

tiluwih bukan sekadar perayaan budaya, tetapi bentuk nyata promosi potensi lokal yang mengangkat tradisi, budaya, dan kuliner khas Desa Jatiluwih.

Bahkan, ia mengatakan, Subak Jatiluwih telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 6 Juli 2012. Di penghujung 2024, Desa Wisata Jatiluwih juga meraih tiga penghargaan prestisius, yakni Best Tourism Village dari UNWTO, sertifikat desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf, serta penghargaan desa wisata digital friendly dari ajang Dewiku.

“Saya mendorong agar Jatiluwih tetap aktif dipromosikan melalui media sosial dan kegiatan festival, guna menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara,” katanya.

Festival kali ini mengusung tema “Growth with Nature” atau “Tumbuh Bersama Alam”, yang menurut Bupati Sanjaya sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana,

menjaga harmoni antara manusia dan alam.

“Tema ini pada dasarnya juga dapat dimaknai sebagai sebuah upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi kita yaitu, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM). Saya ingin menjadikan visi ini sebagai kiblat atau arah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Tabanan,” katanya.

Ia berharap, ke depan dapat diselenggarakan kegiatan pariwisata bertaraf internasional di Jatiluwih yang mampu menarik lebih banyak wisatawan asing.

Ia juga meminta badan pengelola DTW Jatiluwih terus berinovasi dan menciptakan terobosan strategis, namun tetap menjaga identitas Jatiluwih sebagai pariwisata berbasis pertanian dan budaya. (ant)

Pemkab Badung Optimalkan Potensi Pajak Untuk Tingkatkan PAD

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memulai penanaman pendataan potensi pajak daerah secara serentak guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kebijakan strategis ini kami ambil atas dasar kondisi potensi pajak yang belum digarap secara maksimal. Terbukti data dari Sistem Online Single Submission (OSS) menunjukkan dari 40.060 izin usaha yang terbit, baru 10.400 memiliki NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah),” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ia mengatakan mereka juga membentuk Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, seperti perangkat daerah, lurah, perbekel, dan kepala lingkungan.

Tim TPOD tersebut dibentuk untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang dinilai belum maksimal seperti yang terjadi di wilayah Kuta Utara dengan

13.362 izin usaha telah terbit, namun belum memiliki NPWPD.

“Melalui upaya ini kami berharap bisa mendapatkan hasil yang maksimal, setidaknya dapat dilihat dari kuantitatif dan kualitas wajib pajak yang didata. Dan dengan penanaman ini, kami optimis PAD Badung akan meningkat,” katanya.

Sementara itu, Ketua TOPD IB Surya Suamba mengungkapkan jumlah potensi pajak daerah berdasarkan data perizinan berusaha terbit tahun 2021-2025 sebanyak 40.060 usaha.

Dari jumlah tersebut 10.467 usaha telah memiliki NPWPD, namun 7.232 usaha perlu validasi ulang.

Kemudian 29.593 usaha baru yang perlu didata dan total 36.825 usaha yang perlu didata dan validasi ulang sudah dilengkapi



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa secara resmi mencanangkan pelaksanaan pendataan potensi pajak daerah secara serentak di Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

koordinat lokasi-lokasi usaha tersebut.

“Sebaran data potensi pajak daerah berdasarkan data izin usaha yang terbit dari sistem OSS yaitu di Kecamatan Kuta Utara 13.362 izin, Kuta Selatan 10.061 izin, Kuta 9.803 izin, Mengwi 5.380 izin, Abiansemal 995 izin dan Petang 189 izin,” ungkap dia.

Ia mengatakan pendataan potensi pajak daerah akan dilakukan menggunakan Sistem Informasi Optimalisasi Pajak Daerah (SIOPD) yang dibangun oleh Tim IT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Bappeda dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badung. (adv)

Pemkab Badung Data Potensi Pajak Daerah Pada 2.749 Izin Usaha



Tim TOPD dari Dinas PUPR, Bagian Prokompim Setda Badung dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Badung melakukan pendataan potensi pajak daerah di wilayah Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kaja, Rabu (9/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melakukan pendataan potensi pajak daerah di 2.749 izin usaha yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS) di wilayah Kerobokan dan Kerobokan Kaja, Badung.

“Izin usaha perlu divalidasi keakuratannya sebagai dasar pengenaan pajak daerah untuk menggali potensi sumber pendapatan daerah secara optimal,” ujar Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Badung Made Su-

ardita di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan itu merupakan wujud pelaksanaan arahan strategis pimpinan daerah dan mencerminkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola PAD yang berkelanjutan, akuntabel, dan berbasis data.

Menurut dia, Pemkab Badung memastikan seluruh proses pendataan dilakukan sesuai standar teknis dan etika pelayanan publik dan menjamin akurasi data dan transparansi proses.

“Ini menjadi tonggak awal modernisasi sistem basis data perpajakan daerah yang lebih sistematis dan efisien yang juga mendorong peningkatan kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan,” kata dia.

Adapun sektor usaha yang

menjadi fokus pendataan di wilayah Kerobokan dan Kerobokan Kaja meliputi, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, PBJT atas jasa perhotelan dan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Kegiatan itu dijadwalkan berlangsung selama lebih dari satu bulan, yaitu sejak 8 Juli hingga 21 Agustus 2025 dengan melibatkan total 48 personel lintas perangkat daerah.

“Tim pendataan ini terdiri atas 14 personel dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 5 personel dari bagian tata pemerintahan, dan 5 personel dari bagian prokompim,” kata dia.

Melalui kegiatan itu, Pemkab Badung berharap dapat memperoleh data wajib pajak yang akurat dan komprehensif, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. (adv)

Galeri UMKM Beri Ruang Pelaku Industri UMKM di Badung

WAKIL Bupati Badung Bagus Alit Sucipta mengatakan Galeri UMKM yang dibuka di Gedung DPRD Badung telah memberikan ruang memasarkan produk-produk industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat.

"Kami mengapresiasi pembukaan galeri UMKM ini, karena bagaimanapun juga gedung dewan adalah rumah rakyat terlebih langkah ini dilakukan untuk memberikan ruang kepada pelaku UMKM," ujar Wabup Alit Sucipta dalam keterangannya, di Mangupura, Badung, Bali, Jumat.

Ia mengatakan adanya galeri UMKM itu menjadi bentuk dari prinsip rumah rakyat yang mewadahi komunikasi rakyat dengan anggota dewan dalam menyalurkan aspirasinya.

"Sama seperti dengan sek-

tor UMKM ini yang diberikan tempat, ruang di Gedung DPRD Badung sehingga UMKM ini bisa menjual produknya," kata dia.

Wabup Alit Sucipta menjelaskan Pemkab Badung juga akan terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM setempat melalui sejumlah program salah satunya adalah Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara).

Menurut dia, sesuai dengan janji kampanye yang telah disampaikan, pada Agustus 2025 pihaknya akan meningkatkan program Sidi Kumbara yaitu pada batas pinjaman pelaku UMKM yang mencapai Rp100 juta.

Program tersebut memberikan fasilitas pinjaman dengan bunga nol persen yang dirancang untuk memberdayakan pelaku UMKM di wilayah



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta meninjau Galeri UMKM, di Gedung DPRD, Puspem Badung, Bali. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Badung.

"Semoga bisa diluncurkan pada bulan Agustus mendatang, kami juga memohon kerja sama dari jajaran legislatif, sehingga

semua program-program kerakyatan yang berpihak kepada masyarakat dapat kami dorong bersama," kata Wabup Alit Sucipta. (adv)

Pemkab Badung Serahkan Dana Hibah Untuk Upacara Adat Masyarakat



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Karya Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini Medasar Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Lambing, Desa Sibangkaja, Abiansemal, Jumat (11/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali menyerahkan bantuan dana hibah sebesar Rp2 miliar untuk ritual Karya mamungkah, melaspas, mendem pedagingan, pedudukan agung menawa ratna mapeselang, Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini Medasar Tawur Balik Sumpah Utama.

Bantuan itu diserahkan untuk masyarakat di Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Lambing, Desa Sibangkaja, Abiansemal, Badung, Jumat.

"Bantuan dana hibah ini bersumber dari APBD induk 2025," ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menandatangani prasasti pelaksanaan Karya Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini tersebut.

Ia mengatakan dirinya mengapresiasi kekompakan masyarakat Desa Adat Lambing Sibangkaja dalam pelaksanaan karya tersebut.

"Kami pemerintah selalu hadir sehingga kegiatan karya bisa berjalan lancar, yang didasarkan rasa mesikinan krama semua. Semoga dengan karya ini, kami semua diberikan keselamatan dan kesejahteraan," kata dia.

Ketua Panitia Karya Putu Eka Sujaya menjelaskan pelaksanaan karya tersebut terlaksana dengan semangat gotong royong oleh krama Desa Adat Lambing Sibangkaja.

"Tentu ini tidak bisa terlepas dari Pemkab Badung yang sudah memberikan bantuan hibah sebesar Rp2 miliar. Kami berterima kasih kepada Bapak Bupati Badung, semoga diberikan keselamatan dalam memimpin dan menjalankan roda pemerintahan di Badung," jelas dia. (adv)

Bupati-Wabup Badung Hadiri Puncak Karya Tawur Balik Sumpah Utama

BUPATI Badung, Bali I Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta menghadiri Puncak Karya Mapedudusan Agung Menawa Ratna Mapeselang Medasar Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung.

“Melalui karya ini dirinya mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung untuk meningkatkan sradha bakti kepada Ida Sesuhunan yang berstana di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung,” ujar Balti Adi Arnawa, Kamis (10/7).

Ia mengatakan melalui ritual itu Pemerintah Kabupaten Badung berharap dapat diberikan kekuatan serta ketenangan dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Badung.

Bupati Adi Arnawa juga berharap Kabupaten Badung dapat menjadi wilayah yang gemah ripah loh jinawi dan makmur.

“Ini juga merupakan wujud syukur serta persembahan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, semoga diberikan tuntunan serta anugerah kepada pimpinan perangkat daerah di Pemkab Badung untuk bisa mensejahterakan masyarakat,” kata dia. (adv)



Bupati Wayan Adi Arnawa didampingi Wabup Bagus Alit Sucipta menghadiri Puncak Karya Mapedudusan Agung Menawa Ratna Mapeselang Medasar Tawur Balik Sumpah Utama di Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, Kamis, (10/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Pemkab Badung Kembangkan Infrastruktur di Kawasan Wisata



Bupati Badung Wayan Adi Arnawa melakukan inspeksi beberapa titik kegiatan Infrastruktur yang berada di wilayah Desa Cemagi. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali mengembangkan sejumlah fasilitas infrastruktur untuk mendukung kegiatan pariwisata di kawasan Desa Cemagi, Badung.

“Pemkab Badung berkomitmen untuk mewujudkan infrastruktur yang layak dan representatif dalam upaya memberikan rasa aman kepada masyarakat dan wisatawan

yang datang,” ujar Bupati Badung Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan dirinya beserta jajaran juga telah melakukan inspeksi beberapa pengerjaan infrastruktur yang ada di Desa Cemagi untuk memastikan kualitasnya.

“Saya ingin memastikan infrastruktur yang ada di Cemagi adalah infrastruktur yang layak, representatif sehingga harapan kami wisatawan akan semakin betah tinggal di Cemagi,” kata dia.

Bupati Adi Arnawa menjelaskan infrastruktur di kawasan itu seperti di bagian luar Pura Batu Ngau kedepannya juga akan didorong untuk dilakukan penataan revitalisasi guna mengembalikan kondisi pantai pasca abrasi.

Kawasan itu juga akan ditata ulang dengan membuat

kan pedestrian merubah tata letak bangunan sehingga akan menjadi kawasan luar destinasi wisata Pura Batu Ngau.

“Mudah-mudahan kedepannya juga bisa dibuat panggung pentas Tari Kecak dan ini akan jadi peluang bagi masyarakat setempat mendapatkan hiburan dan pertumbuhan ekonomi juga akan semakin membaik,” kata dia.

Ia menambahkan penataan-penataan infrastruktur itu perlu dilakukan karena Cemagi merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Badung

“Dengan melihat perkembangan Tibubeneng, Berawa dan Cangu maka kawasan-kawasan itu menjadi bagian yang tidak kalah penting karena kami di Badung pendapatan Badung adalah dari sektor pariwisata,” pungkas Bupati Adi Arnawa. (adv)

TP PKK Kabupaten Badung Laksanakan Gerakan Bersih Pantai

TIM Penggerak (TP) PKK Kabupaten Badung, Bali, melaksanakan gerakan bersih-bersih bersama di Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program TP. PKK Kabupaten Badung karena sampah selalu menjadi masalah yang sangat sulit untuk ditangani,” ujar Ketua TP PKK Badung Rasniathi Adi Arnawa, Minggu (13/7).

Ia mengatakan untuk itu dirinya mengajak TP PKK kecamatan dan organisasi kewanitaan setempat untuk melakukan gerakan bersih-bersih secara rutin.

“Gerakan bersih-bersih seperti ini kami harapkan akan rutin dilaksanakan setidaknya

satu bulan sekali,” kata dia.

Rasniathi Adi Arnawa menjelaskan upaya itu dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur Bali untuk menanggulangi sampah plastik dan mengurangi sampah plastik.

“Rata-rata masalah sampah sudah bagus penanggulangannya cuma perlu dibenahi lagi,” jelas dia.

Ia menambahkan selain kegiatan bersih-bersih masyarakat juga diimbau untuk memilah sampah serta memanfaatkan dan mengolah sampah yang ada di rumah.

“Seperti yang memiliki pekarangan rumah luas disarankan untuk membuat teba modern dan kemudian hasilnya bisa dijadikan pupuk untuk tanaman,” pungkas Rasniathi Adi Arnawa. (adv)



Rasniathi Adi Arnawa saat gerakan bersih-bersih bersama di Pantai Munggu, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (13/7/2025). ANTARA/HO-Pemkab Badung

Wabup Badung Ajak Generasi Muda Bersatu Jaga Seni Budaya Bali



Wabup Bagus Alit Sucipta menghadiri perayaan HUT Ke-35 STT. Wijna Karya. ANTARA/HO-Pemkab Badung

WAKIL Bupati Badung, Bali, Bagus Alit Sucipta mengajak generasi muda di wilayah setempat untuk bersatu menjaga

seni tradisi Bali.

“Pemuda yang tergabung dalam Sekaa Teruna untuk selalu bersatu sebagai ujung

tombak bersatunya banjar dan berpesan kepada Sekaa Teruna untuk bersama-sama terus menjaga seni tradisi dan

budaya Bali,” ujar Wabup Bagus Alit Sucipta dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.

Ia menjelaskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya khususnya generasi muda, Pemkab Badung juga memiliki salah satu program yaitu bimbingan belajar.

“Tujuan mencerdaskan anak bangsa sehingga balai banjar sebagai pusat peradaban untuk tempat belajar, saya minta generasi muda agar dapat dimanfaatkan dengan baik kesempatan ini,” jelas dia.

Untuk mendukung kegiatan generasi muda, Wabup Alit Sucipta juga menghadiri HUT Ke-35 STT Wijna Karya sekaligus menyerahkan Piala Wijna Karya Kite Festival 1 di Banjar Peregae Mengwi.

Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap kegiatan tersebut, Wabup Bagus Alit Sucipta membantu dana sebesar Rp30 juta yang diterima Ketua ST Wijna Karya Putu Bayu Adi Wiraguna. (adv)

Pemkab Badung Rancang Beasiswa Guna Ciptakan SDM Unggul

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali merancang program beasiswa untuk masyarakatnya sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

“Program ini diinisiasi sebagai bentuk perhatian dan komitmen kami terhadap dunia pendidikan. Beasiswa ini bukan semata bantuan, tetapi investasi masa depan untuk menjadikan Badung yang tangguh dan berdaya saing,” ujar Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangannya di Mangupura, Senin.

Ia mengatakan program itu dirancang untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi masyarakat kurang mampu dan pelajar berprestasi.

Inisiatif itu juga merupakan upaya nyata serta sinergi antara pemerintah daerah di Badung dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya program Satu Keluarga Satu Sarjana.

Dirinya berharap program itu dapat menjadi jembatan bagi generasi muda Badung dalam mewujudkan cita-cita.

Pemkab Badung juga mengarahkan agar nantinya seluruh perangkat daerah teknis segera menyusun pedoman teknis dan regulasi yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Untuk itu, pihaknya juga telah melaksanakan rapat koordinasi program beasiswa itu bersama jajaran Inspektorat, Dinas Dikpora, BPKAD, Bagian Kesra Setda Badung, serta Tim Perumus Kebijakan Kabupaten Badung. (adv)



Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Ratusan perempuan di Badung Ikuti Pelatihan Atasi Kebakaran



Ketua Tim Penggerak PKK Badung Rasniathi Adi Arnawa menghadiri pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga di Badung Tahun 2025 di Ruang Rapat Nayakottama Kantor KPU Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/7/2025). ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

SEBANYAK 124 perempuan yang merupakan istri dari kelian dinas atau kepala lingkungan dari 62 desa/kelurahan se-Kabupaten Badung, Bali

mengikuti pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga.

“Pelatihan ini sangat penting diikuti oleh para peserta untuk

mengetahui tentang bagaimana cara menanggulangi dan mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar,” ujar Ketua TP. PKK Badung Rasniathi Adi Arnawa di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Senin.

Ia mengatakan pihaknya berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan itu dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya pengetahuan yang didapat dapat disebarluaskan minimal di rumah tangga masing-masing.

“Pengetahuan ini juga dapat disosialisasikan kepada masyarakat tentang mencegah dan menanggulangi kalau terjadi bencana kebakaran,” kata dia.

Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Badung I Wayan Wirya menjelaskan

para peserta diharapkan dapat menjadi pionir untuk memberikan informasi dalam penanganan awal api di lingkungan sekitar.

Saat mengikuti pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari itu peserta juga akan mendapatkan teori langsung dalam menggunakan apar dan alat pemadam lainnya.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berupaya memberikan pemahaman dan keterampilan kepada anggota keluarga dalam menghadapi situasi darurat kebakaran

“Kami juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum,” pungkas Wayan Wirya. (adv)

Pemkab Badung Perkuat Pariwisata Dalam RPJMD 2025-2029

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali memasukkan penguatan sektor pariwisata sebagai hal yang substansial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badung Tahun 2025-2029.

“Sebagai daerah yang bertumpu pada sektor pariwisata, penguatan pariwisata ini bertujuan agar Kabupaten Badung tidak ditinggalkan oleh para wisatawan,” ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta di Mangupura, Kabupaten Badung, Senin.

Ia mengatakan dokumen Ranperda RPJMD yang telah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Badung itu, selain berfokus kepada penguatan sektor pariwisata, juga memuat sejumlah program prioritas lain yang akan dijalankan untuk masyarakat Badung

“Di antaranya adalah pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan juga akan kami prioritaskan,” kata dia.



Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta saat menyerahkan dokumen Ranperda tentang RPJMD Badung Tahun 2025-2029 kepada pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Bali, Senin (14/7/2025) di Puspem Badung. ANTARA/HO-Humas Pemkab Badung

Ia menjelaskan di dalam RPJMD Kabupaten Badung itu tertuang penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih.

Menurut Wabup Alit Sucipta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, Pemkab Badung wajib menyerahkan dokumen ini kepada Pimpinan DPRD Badung untuk nantinya dapat segera dibahas bersama dengan para Ketua Fraksi dan Anggota DPRD Badung.

“Saya menyerahkan doku-

men ini kepada pimpinan DPRD Badung agar sesuai dengan limit atau batas waktu peraturan perundang-undangan yaitu enam bulan setelah dilantik agar dokumen ini dapat segera disahkan menjadi Perda Badung,” pungkask dia. **(adv)**



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar rapat koordinasi lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting. ANTARA/HO-Humas Bangli

PEMERINTAH Kabupaten Bangli melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan angka stunting.

“Rakor ini berlangsung di Ruang Rapat Gedung PLUT dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait,” kata Sekretaris Dinas PMD, Ni Made Ariyani, dalam siaran pers Dis-

kominfo Bangli, Sabtu.

Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi dari semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun daerah.

“Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga multidimensional yang membutuhkan pendekatan komprehensif dari berbagai sektor. Kita harus bekerja sama, bahu-

Pemkab Bangli Percepat Penurunan Stunting

membahu, untuk memastikan anak-anak kita tumbuh optimal dan bebas dari stunting,” ujar Ariyani.

Dalam rakor ini membahas berbagai strategi dan program yang akan diintensifkan, di antaranya yakni optimalisasi intervensi spesifik dan sensitif yakni fokus pada peningkatan cakupan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi lengkap, pemberian ASI eksklusif, perbaikan gizi ibu hamil dan balita, serta penyediaan air bersih dan sanitasi layak.

Penguatan Peran Desa dengan cara mendorong desa untuk mengalokasikan dana desa secara efektif guna mendukung program pencegahan stunting, termasuk edukasi masyarakat dan pemanfaatan tumbuh kembang balita.

Edukasi dan Sosialisasi

Berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang sejak masa pra-konsepsi hingga balita, serta dampak buruk stunting terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pemanfaatan Data Terpadu, dengan memaksimalkan penggunaan data stunting yang akurat dan terkini untuk identifikasi sasaran prioritas dan evaluasi program secara berkala.

Dengan koordinasi yang lebih intensif, Kabupaten Bangli berharap dapat mencapai target penurunan angka stunting secara signifikan dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Upaya ini sejalan dengan target nasional untuk menurunkan prevalensi stunting. **(ant)**

Pemkab Bangli - DPRD Klungkung Bahas Pengelolaan Data Statistik

DINAS Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Klungkung kemudian membahas pengelolaan data statistik.

“Kunjungan DPRD Klungkung bertujuan untuk mempelajari pengelolaan data statistik di Kabupaten Bangli dan meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerah Klungkung,” kata Plt Kepala Diskominfosan Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha, di Bangli, Selasa.

Ia menyambut rombongan Komisi II DPRD Klungkung yang berjumlah 15 orang dipimpin oleh Ketua Komisi II, I Nengah Ari Priadnya.

Plt. Kadis Kominfosan Bangli menyampaikan profil dinas serta menjelaskan pentingnya pengelolaan data dalam membuat perencanaan.

Ia juga memaparkan berbagai hal terkait langkah-langkah

strategis yang dilakukan dalam pengelolaan sebuah data yang akurat.

Hasil dari studi tiru ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masing-masing daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai data statistik.

Pengelolaan data dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan daerah, ungkap Murditha.

Pengelolaan data di Kabupaten Bangli menjadi referensi penting bagi Komisi II DPRD Klungkung.

Ketua Komisi II DPRD Klungkung Ari Priadnya memberikan apresiasi atas inovasi yang telah diterapkan di Kabupaten Bangli, terutama di bidang data statistik.

“Pengelolaan data di Kabupaten Bangli menjadi contoh bagi kami untuk mengembangkan tata kelola statistik dan data di daerah kami,” ujarnya.



Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Bangli menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Klungkung. ANTARA/HO-Humas Bangli

Acara tersebut juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab, serta bertukar gagasan terkait pengelolaan data statistik.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara Kabupaten

Bangli dan Kabupaten Klungkung dalam bidang pengelolaan data statistik.

Diskominfosan Kabupaten Bangli siap menjadi mitra dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di daerah Klungkung. **(ant)**

Pemkab Buleleng Prioritaskan Penataan Kota Singaraja



Bupati Buleleng I Nyoman Sutjindra saat meninjau perbaikan di beberapa sudut Kota Singaraja, Bali, Rabu (16/7/2025). ANTARA/IMBA Purnomo

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Buleleng, Bali memprioritaskan penataan kawasan Kota Singaraja sebagai salah satu program unggulan pembangunan di kabupaten ujung utara Pulau Dewata tersebut.

“Salah satu program prioritas kami kan penataan kawasan

Kota Singaraja. Ini baru awal saja ini,” ujar Bupati Buleleng I Nyoman Sutjindra saat ditemui usai meninjau Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di ruas Jalan Udayana, Singaraja, Bali, Rabu.

Ia mengungkapkan penataan akan meluas mencakup ruas-

ruas jalan penting di kota tersebut. Adapun upaya pembenahan yang sedang berjalan saat ini masih merupakan tahap awal dari rencana jangka panjang. Rencananya, penataan akan berlanjut dari kawasan Sukasada hingga ke Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng.

“Nanti akan ada yang tertata lebih baik lagi dari Sukasada itu sampai di Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. Sepanjang Jalan Protokol memang kita akan tata supaya lebih indah, lebih nyaman, dan aman di malam hari,” kata Sutjindra.

Penekanan pada keamanan, terutama di malam hari, menjadi salah satu aspek krusial dalam desain penataan ini.

Sutjindra juga menyebutkan aspek estetika turut dipertimbangkan dalam perencanaan, termasuk mempertimbangkan aspek keamanan dan kelestarian lingkungan.

“Selain estetika kita juga memperhitungkan masalah keamanan dan lain-lain. Seperti tanaman, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sudah turun untuk bagaimana ke depan pohon-pohon ini tetap dilestarikan tapi tanpa mengurangi efek penataan taman,” katanya.

Untuk ruas jalan selanjutnya yang akan ditata, kata Sutjindra, masih akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan.

“Ruas jalan selanjutnya ya kita tunggu saja ya. Nanti kita lihat yang di mana yang memang perlu ditata. Nanti hampir semua sudut kota ya,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan proyek percontohan yang sedang berjalan ini diharapkan menjadi model untuk penataan di wilayah lain, sejalan dengan program penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Bung Karno, hingga Kawasan Pelabuhan Tua Buleleng. **(ant)**

Pengiriman Pekerja Migran Jembrana ke Jepang Tanpa Hambatan

PENGIRIMAN pekerja migran asal Kabupaten Jembrana, Bali ke Jepang masih berjalan lancar, tanpa hambatan meski ada peristiwa yang membuat pemerintah negara tersebut waspada terhadap tenaga kerja dari Indonesia.

“Sampai saat ini masih normal-normal saja. Memang ada penekanan dari perusahaan penerima di Jepang terkait peristiwa itu, tetapi tidak sampai menghambat keberangkatan pekerja migran asal Jembrana,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana Putu Agus Arimbawa di Negara, Jumat.

Dari informasi yang pihaknya peroleh, pembatasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Jepang, hanya berlaku untuk daerah asal pekerja migran yang berperilaku negatif di negara

tersebut.

Dia mengaku sudah menerima imbauan dari KBRI di Jepang, yang akan segera disampaikan ke lembaga pelatihan kerja bersama dengan organisasi mereka.

“Penekanan dari imbauan tersebut, pekerja migran asal Indonesia harus menghormati dan mematuhi hukum, budaya serta etika di Jepang,” katanya.

Menurut dia, penekanan terkait itu selalu pihaknya sampaikan kepada pekerja migran asal Jembrana, dan tidak hanya bagi yang akan berangkat ke Jepang, juga yang bekerja di negara manapun.

Saat ini, kata dia, berdasarkan data yang pihaknya peroleh sekitar 600 warga Kabupaten Jembrana bekerja di luar negeri.

“Sebagian besar berada di Jepang. Sehingga, kami betul-betul menekankan kepada pekerja asal



Pekerja migran asal Jembrana mengecek kelengkapan dokumen sebelum berangkat ke Jepang. ANTARA/HO-Humas Pemkab Jembrana

Jembrana untuk mematuhi aturan di sana, karena Jepang menjadi negara tujuan utama pekerja migran asal Jembrana,” katanya.

Dia mengatakan Pemkab Jembrana berharap setelah bekerja di Jepang, tenaga migran itu bisa membawa ilmu dan etos kerja un-

tuk mereka terapkan di kampung halaman.

“Kami berharap saat pulang mereka memiliki jiwa wirausaha, sehingga bisa membuka usaha dan lapangan pekerjaan di Jembrana berdasarkan pengalaman di Jepang,” katanya. **(ant)**

DPRD Bali Studi Tiru NTB Cara Olah Sampah Jadi SRF



Sekretariat DPRD Bali studi tiru pengolahan sampah jadi SRF di TPA Kebon Kongok, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

SEKRETARIAT DPRD Bali melakukan studi tiru dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat, dalam upaya pengolahan sampah menjadi bernilai guna dan bernilai jual.

Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Bali I Kadek Putra Suantara di Mataram, Kamis,

mengaku takjub karena hasil dari sampah yang diolah di TPA Kebon Kongok berhasil diubah menjadi Solid Recovered Fuel (SRF).

“Kami ingin dibagikan pengetahuan dari NTB terutama dengan pengolahan sampah jadi SRF yang nantinya mungkin kami jadikan sebagai bahan masukan

atau bahan pertimbangan untuk bisa ditiru Bali,” kata dia.

Kadek Putra menyampaikan di Bali sendiri sebelumnya tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pernah mengolah sampah untuk menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) namun terkendali off taker atau penerima.

Sementara di Pemprov NTB terutama UPTD TPA Kebon Kongok berhasil menjual SRF ke PLTU Jeranjang yang merupakan pembangkit untuk kelistrikan di Lombok.

“Kami ingin menggali lebih rinci lebih dalam bagaimana sistem atau mekanisme dalam pemrosesan limbah atau sampah yang ada di sini,” ujarnya.

Baca juga: DPRD Bali gali pengalaman Pemkot Mataram dalam kelola TPST

DPRD Bali melihat yang menjadi kendala selain hasil dari pengolahan sampah adalah peran masyarakat dalam mendukung regulasi yang sudah

dibuat dewan bersama Pemprov Bali.

Kepala UPTD TPA Kebon Kongok Radius Ramli Hidarman sepakat, sebab di balik kesuksesan mereka kendala sampah dari masyarakat di hulu juga mereka rasakan.

Radius menjelaskan awalnya tempat pengolahan sampah di TPA tersebut juga dirancang untuk menghasilkan RDF seperti Bali, namun setelah dilakukan penelitian ditemukan bahwa formulasi sampah menjadi SRF lebih bernilai guna dan jual sebab mereka memiliki PLTU tepat di sebelah barat TPA yang siap membeli.

“Kalau RDF itu lebih heterogen sedangkan SRF lebih homogen, jadi RDF komposisinya itu beragam kecuali sampah limbah medis sedangkan SRF komposisinya 95 persen itu dari sampah organik, utamanya daun-daun ranting dan hanya 5 persen yang sampah anorganik,” ujarnya. **(ant)**